

JURNAL

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI MUKA UMUM**



Diajukan oleh :

NOVARIA EKARISTY SIHOTANG

NPM : 120510939
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhusuan: Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2016

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI MUKA UMUM



Diajukan oleh :

NOVARIA EKARISTY SIHOTANG

NPM : 120510939
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui sebagai ringkasan skripsi

Dosen Pembimbing : **Tanggal** : 26 January 2017

Dr. Anny Retnowati, SH.,M.Hum : **Tanda tangan** :

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



PX. Endro Susilo, S.H.,LL.M

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI MUKA UMUM

NOVARIA EKARISTY SIHOTANG

Fakultas Hukum Universitas Atama Jaya Yogyakarta

Email: novariaekaristy2013@gmail.com

Women are creatures of gentle and loving because she felt the smooth women expressing feelings through talking and feelings, physiological and anatomical differences cause differences in behavior and in terms of ability but the role of women and men are basically the same which is contained in 28D constitution everyone has the right to equal treatment before the law. In Indonesia within this much going on cases of sexual harassment, sexual abuse is any sexual act or the rising motion is undesirable in the form of verbal or in writing, not verbal, physical and visual sexual interests for causing anger, feeling insulted, uncomfortable for the others. Sexual harassment there are two forms of verbal and non verbal, sexual harassment occurs because women are considered class two, powerlessness of the victim, weak laws concerning sexual harassment. The problem is how to attract the perpetrators of criminal sexual that which focuses on positive legal norms and regulations. The results of accountability of perpetrators of criminal acts of sexual harassment against women in public when offenders under the age of apology to the victims and their families and when adult offenders subject to criminal sanction.

Keywords: Sexual Harassment, Women, Verbal

PENDAHULUAN

Perempuan adalah makhluk yang lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus, perempuan mengungkapkan perasaan melalui bicara dan perasaan. Perempuan lebih perhatian pada ungkapan, kata, relasi, proses. Perempuan lebih membangun relasi, komunikasi, lebih menekan seluruh proses, seluruh pribadi dengan seluruh perasaan kerasnya.

Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan pula perbedaan pada tingkah lakunya dan timbul juga perbedaan dalam hal kemampuan, selektif terhadap kegiatan-kegiatan intensional yang bertujuan dan terarah dengan kodrat perempuan.

Peran perempuan dan laki-laki pada dasarnya sama, itu juga telah diamanatkan oleh konstitusi kitab Undang-undang Dasar tahun 1945 pada penggalan Pasal 28 D yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Baik berperan

dalam politik, berperan dalam dunia pendidikan, berperan dalam dunia kesehatan dan berperan dalam bentuk apapun.

Di Indonesia dalam kurun waktu ini banyak terjadi kasus pelecehan seksual. Pelecehan Seksual adalah setiap tindakan/perilaku/ gerak-gerik seksual yang tidak dikehendaki dalam bentuk verbal (kata-kata) atau tulisan, fisik, tidak verbal, dan visual untuk kepentingan seksual, memiliki muatan seksual sehingga menyebabkan kemarahan, perasaan terhina, malu, tidak nyaman dan tidak aman bagi orang lain.

Pelecehan seksual dapat terjadi antara berlainan jenis kelamin maupun sesama jenis kelamin. Pelecehan seksual terjadi bisa berulang-ulang maupun hanya sekali di lakukan. Kasus pelecehan seksual di muka umum sering terjadi di angkutan umum, kantor, kampus, sekolah, lingkungan di sekitar rumah dan lain-lain dan pelecehan seksual di muka umum terjadi baik verbal maupun non verbal.

Bentuk dari pelecehan seksual dengan verbal ialah menggoda, bercanda, menulis surat, bersiul, ajak kencan bersifat seksual yang tidak diinginkan, menceritakan atau menyebarkan gosip, rumor, cerita tentang kehidupan seksual seseorang, melakukan tekanan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sedangkan pelecehan non verbal ialah memperlihatkan gerak-gerik seksual, memperlihatkan alat kelamin, melakukan sentuhan atau gesekan seksual terhadap diri sendiri di hadapan orang lain, menatap seseorang dengan pandangan ke arah tubuh tertentu dengan muatan seksual, membuat ekspresi wajah seperti main mata, menjilat ludah atau melempar ciuman pada seseorang.

Beberapa hal dan situasi yang mempengaruhi atau memungkinkan pelecehan seksual tetap terjadi sampai hari ini antara lain budaya tempat perempuan dianggap kelas kedua. Perempuan dianggap kelas dua sehingga perlakuan tidak adil, pelecehan sering tidak dipermasalahkan. Perempuan dianggap objek, perempuan harus mengalah terhadap laki-laki juga dalam rumah tangga, penyalahgunaan kekuasaan oleh yang mempunyai kuasa, ketidakseimbangan dalam perkembangan psikoseksual banyak orang sehingga melakukan tindakan yang tidak baik, ketidakberdayaan pihak yang dilecehkan karena masih datang lagi kepada yang melecehkan karena situasi baik secara ekonomi maupun sosial, sering pihak korban pelecehan masih saja datang kepada yang melakukan pelecehan, lemahnya hukum yang menyangkut soal *sexual harrasement*.

2. METODE

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum secara normatif, dimana penelitian hukum normatif ialah penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, pendapat para ahli dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti dan Wawancara bebas dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan sebagai

pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Melakukan pengolahan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian hukum normatif, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan-larangan tersebut.

Beberapa pembagian hukum pidana atas dasar:

- a. Hukum pidana dalam keadaan diam yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana dalam keadaan bergerak yaitu hukum pidana formal.
- b. Hukum pidana objektif adalah hukum pidana yang dilihat dari larangan-larangan berbuat yaitu larangan yang disertai dengan ancaman bagi siapa yang melanggar larangan tersebut dan hukum pidana subjektif merupakan aturan yang berisi hak atau kewenangan negara untuk menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum, memberlakukan (sifat memaksa) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan, menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara kepada pelanggar hukum.

Berlakunya hukum pidana dibedakan antara hukum pidana umum ialah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga dan tidak membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan bagi subjek hukum tertentu saja.

Sumber hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana umum dan khusus, hukum pidana umum bersumber pada kodifikasi (KUHP) sedangkan hukum pidana khusus bersumber pada peraturan perundang-undangan diluar KUHP.

Fungsi hukum pidana sebagai berikut:

- a. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya.
- b. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi negara mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.
- c. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka menjalankan fungsi negara mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.

Tujuan hukum pidana dikenal dua aliran yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
- b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Pertanggungjawaban tindak pidana dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam undang-undang pidana untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya sedangkan syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat yang mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan hal yang buruk.

Unsur-unsur pertanggungjawaban tindak pidana lebih lanjut segi psikologis kesalahan juga harus dicari di dalam batin pelaku yang menunjukkan adanya hubungan dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Seseorang yang memiliki kelainan jiwa tidak dapat dikatakan memiliki hubungan batin antara dirinya dengan perbuatannya yang dilakukan karena orang tersebut tidak menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Mengenai pelecehan seksual bahwa didalam KUHP tidak menggunakan istilah pelecehan seksual tetapi menggunakan istilah kejahatan terhadap kesopanan sebagaimana diatur dalam Bab XIV buku kedua tentang kejahatan. Pada bab XIV ialah kejahatan terhadap kesusilaan yang terdapat dalam pasal 281-298.

Pertanggungjawaban tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan bila pelaku adalah anak dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak nomor 11 tahun 2012 ialah yang telah berusia 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum menikah maka anak itu diberi diversi.

Diversi ialah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pidana yang tujuannya agar tidak memberikan dampak negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterkaitannya dengan sistem peradilan pidana.

Tujuan diberikannya diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan,

keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Melakukan diversi harus mempertimbangkan ialah kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Hasil kesepakatan diversi dapat berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan di muka umum ialah bila pelaku dibawah umur dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut peraturan yang berlaku mengenai sistem pertanggungjawaban pidana terhadap anak adalah sama dengan orang dewasa hanya saja ancaman pidananya tidak sama dengan orang dewasa. Berdasarkan Pasal 23 Undang-undang No. 3 Tahun 1997, anak dapat dijatuhi hukuman berupa pidana pokok maupun tambahan serta tindakan, tindakan dapat digunakan demi kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan pemidanaan merupakan solusi terakhir yang harus dipilih dan bila pelaku sudah dewasa maka pertanggungjawabannya ialah terjerat Pasal 289 KUHP mengenai perbuatan cabul dan Pasal 310 mengenai perbuatan tidak menyenangkan.

REFERENSI

BUKU/LITERATUR

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo, Jakarta

Ahmad Husnan, 1995, *Keadilan Islam Antara Wanita dan Laki-laki*, Solo, Al-Husna.

Alex Irwan, 1999, *Perisai Perempuan: kesepakatan internasional untuk perlindungan perempuan*, Yayasan Galang, Yogyakarta.

Andi Zaenal Abidin, 1983, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Choerul Huda, S.H., M.H, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta

Djoko Prakoso, S.H, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Liberti.

Hamzah Hatrik, S.H., M.H, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.

Mahrus Ali, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rinek Cipta, Jakarta.

Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., 2010, *Hukum Pidana*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru.

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux*, Semarang, Widya Karya, 2012.

JURNAL

Sudarto, 1988, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan bahan-bahan kuliah FH Undip.

Yurika Fauzia Wardhani dan Weny Lestari, *Gangguan Stres Pasca Trauma pada Korban Pelecehan Seksual dan Perkosaan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan, Surabaya.

Nk. Endah Triwijati, *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*, hlm 3.
<http://journal.unair.ac.id>, diakses 4 November 2016

WEBSITE

Utrecht, op, cit, hlm 8, diakses 4 November 2016.

<http://siagudiendjsh.blogspot.com/2009/08/per-tanggungjawaban-pidana.html>, diaskes 6 november 2016.

Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.cit, hlm 74.

repository.uinjkt.ac.id.

Sichesse, 2012, *Makalah Pelecehan Seksual*,
<http://sichesse.blogspot.co.id>, diaskes 6 November 2016.

Kedudukan dan Nilai Perempuan,
<http://www.Pendidikan.net>, diaskes 6 November 2016.

